

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN KE-7 BADAN PEMERIKSA SEDUNIA**



bpk.go.id

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) menjadi tuan rumah pertemuan ke-7 *The International Organisation of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), di Sheraton Bali Kuta Resort. Pertemuan yang diadakan selama dua hari tersebut, dibuka pada tanggal 25 Februari 2014 dan selesai pada 26 Februari 2014. Pertemuan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya korupsiⁱ.

Pertemuan tersebut diikuti oleh 15 negara yakni Armenia, Bulgaria, Cina, Firlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyztan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zaimba. Agenda utamanya adalah berdiskusi mengenai perkembangan rencana kerja kelompok INTOSAI *Key National Indicator*, dan berbagi pengalaman di bidang *Key National Indicator* antarsesama anggota kelompok kerja INTOSAI.

Menurut ketua BPK, Hadi Poernomo, ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan ketidakjelasan fokus, kerap terjadi tidak hanya pada implementasi sebuah kebijakan pembangunan, tetapi juga terjadi pada proses perencanaannya. Padahal implementasi dari rencana pembangunan ini menggambarkan kinerja pemerintah.

Kelompok kerja INTOSAI, kata Hadi Poernomo, berupaya membantu pemerintah tiap negara untuk meningkatkan efisiensi, tansparansi, dan kepercayaan publik dalam upaya memerangi korupsi dan menilai efektifitas dan sumber daya nasional bagi kepentingan negara dan rakyatnya. “Hal ini sesuai dengan visiⁱⁱ dan tujuanⁱⁱⁱ BPK, sehingga BPK ikut bergabung sebagai anggota dalam kelompok kerja ini secara resmi sejak 23 Januari 2009 lalu,” kata Hadi Poernomo.

Hadi Poernomo menegaskan, implementasi dari rencana pembangunan tersebut menggambarkan kinerja pemerintah. BPK, jelas Hadi Poernomo, sesuai dengan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara^{iv} berperan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan melalui rekomendasi^v hasil pemeriksaan^{vi}. “BPK mengembangkan *e-audit* melalui akses data *online* ke sistem informasi entitas terperiksa dan pembentukan pusat data BPK, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, termasuk pengelolaan dan pemeriksaannya,” terang Hadi Poernomo.

Pertemuan ke-7 INTOSAI tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, Anggota BPK Sapto Amal Damandari, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Armida Alisjahbana, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua INTOSAI *working group on Key National Indicator* Tatiana Manuylova, serta beberapa pejabat pemerintah lainnya.

Sumber berita:

1. bisnis.liputan6.com, *15 Auditor Negara dari Eropa Hingga Afrika Kumpul di Bali*, Selasa, 25 Februari 2014.
2. posbali.com, *BPK RI Jadi Tuan Rumah Pertemuan Ke-7 INTOSAI*, Rabu, 26 Februari 2014.

Catatan:

- INTOSAI, didirikan pada tahun 1953, merupakan organisasi internasional yang beroperasi sebagai organisasi payung bagi anggota-anggotanya yang terdiri dari badan pemeriksa eksternal pemerintah. Saat ini INTOSAI memiliki 192 anggota penuh dan 5 *Associated Members*. INTOSAI adalah organisasi otonom, independen dan nonpolitik. INTOSAI adalah organisasi nonpemerintah dengan status konsultatif khusus dengan *Economic and Social Council* (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). (<http://www.intosai.org>).

ⁱ Dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan melanggar hak-hak orang lain sebagaimana dijabarkan “*Act as done with an intent to give some advantage inconsistent with official or fiduciary person who unlawfully and wrongly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights on others*” (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan melanggar hukum menggunakan kedudukannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pihak lain, berlawanan dan kewajibannya serta hak-hak pihak lain).

ⁱⁱ Visi BPK sesuai Rencana Strategis BPK Tahun 2011-2015 yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan (www.bpk.go.id).

-
- iii Tujuan BPK sesuai Rencana Strategis BPK Tahun 2011-2015 terdiri dari 3, yaitu:
- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
 - c. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.
- iv Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- v Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- vi Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).